



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMRAHYADI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS UTAMA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**
3. NHK : **74473**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.500.000.000**

1. Tanah Seluas 207 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/54 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 142 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 57 m2/30 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 169.500.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA LEGENDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA C70 SEPEDA MOTOR Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
4. MOTOR, BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOBIL, VELOZ - Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 65.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	587.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.321.500.000
III. HUTANG	Rp.	60.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.261.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Desember 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.